

**Judul** : DPR: Eksekutif Juga Lakukan Kunker Fiktif  
**Tanggal** : Selasa, 17 Mei 2016  
**Surat Kabar** : Seputar Indonesia  
**Halaman** : 2

# DPR: Eksekutif Juga Lakukan Kunker Fiktif

**JAKARTA** - DPR membalas serangan yang menuduh para wakil rakyat melakukan kunjungan kerja (kunker) fiktif dengan menyatakan praktik kotor itu juga terjadi di pemerintah, termasuk Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR Syaifullah Tamliha mengatakan, penyebab kunker fiktif itu adalah mentalitas individu sehingga perlu ada perbaikan administrasi keuangan yang menjadi pintu masuk terjadinya korupsi.

"Ini (kunker fiktif) terjadi juga di eksekutif. Modusnya pejabat eselon I mau jalan (kunker), tapi jatahnya sudah habis. Kemudian dibuat seolah-olah pejabat eselon II dan III yang berangkat. Itu praktik lama yang terjadi di birokrasi, termasuk juga di tingkat gubernur, bupati dan wali kota," katanya kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.

Dia tak menampik masih ada oknum anggota DPR yang tidak pergi ke daerah pemilihan (dapil) seperti yang terjadi di dapilnya di Kalimantan Selatan (Kalsel). I. Waktui itu merupakan perayaan hari jadi Kalsel dan ada enam anggota DPR yang diundang untuk hadir, tapi hanya dua anggota saja yang datang.

"Ada juga yang datang cuma kongo-kongo saja sama bupati enggak ketemu masyarakat. Itu tidak bisa dimungkiri terganggunya mentalitas," imbuhnya.

Menurut Tamliha, sebenarnya DPR sudah mau memelopori untuk mengurangi kunker dengan tidak kunker ke luar ne-

geri, kecuali untuk alat kelengkapan dewan (AKD) terkait seperti Komisi I DPR dan Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP). Namun, dia menyatakan pimpinan DPR yang tidak konsisten sehingga Majelis Kehormatan Dewan (MKD) DPR dan komisi-komisi lain masih melakukan kunker ke luar negeri.

Dari segi pelaporan pun, hasil kunker DPR masih lebih lengkap dari pada eksekutif karena harus dilampirkan foto dari tiga angle yang berbeda serta bukti-bukti lain, seperti masukan konstituen, tanda terima dari pihak penyelenggara, dan bukti lainnya. Sementara di eksekutif tidak memerlukan bukti foto.

"Kalau anggota DPR tidak bisa membuktikan laporannya, BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) memberlakukan TGR (tuntutan ganti rugi/pengembalian uang kunker)," tuturnya.

Karena itu, yang harus dibenahi dalam persoalan ini adalah

**"Modusnya pejabat eselon I mau jalan (kunker), tapi jatahnya sudah habis. Kemudian dibuat seolah-olah pejabat eselon II dan III yang berangkat. Itu praktik lama yang terjadi di birokrasi, termasuk juga di tingkat gubernur, bupati dan wali kota."**

**SYAIFULLAH TAMLIHA**  
Anggota Banggar DPR

mentalitas pejabatnya. Administrasi keuangan juga harus dilakukan dengan benar karena dapat menjadi celah terjadinya korupsi. BPK juga tidak hanya sebatas mengaudit dan menyampaikan laporan hasil audit, tapi juga membuat sistem secara online dengan hotel dan maskapai di seluruh Indonesia sehingga data akan tersinkronisasi. Dan ini berlaku bukan hanya bagi DPR, melainkan semua instansi.

Wakil Ketua DPR bidang Kesra Fahri Hamzah memperkirakan identitas anggota DPR yang melakukan kunker fiktif diungkap ke publik. Sebab sudah diperintahkan Undang-Undang (UU) Nomor 42/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UUMD3) bahwa untuk memperkuat fungsi representasi, anggota DPR perlu banyak berinteraksi dengan konstituen di dapil masing-masing.

Jangan sampai anggota DPR hanya mengambil uangnya, na-

mun tidak turun ke dapil untuk bertemu masyarakat. Buntutnya justru membuat laporan kunker atau reses yang fiktif. "Itu melanggar etika. Saya kira kita tunggu hasil audit dari BPK untuk menjadi pelajaran bagi anggota dalam menjalankan fungsi representasi," ujarnya.

Hingga kemarin dia belum mendengar mengenai temuan atau nama-nama anggota DPR yang melakukan kunker fiktif. Namun bila nanti hasil audit resmi dari BPK terungkap, pimpinan DPR akan menjadikan itu sebagai dasar untuk menindaklanjutinya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Yenny Sucipto mengatakan, kunker dan bimbingan teknis (bimtek) sering kali menjadi modus anggota DPRD untuk menambah pendapatan. Alasannya, pendapatan yang diperoleh masih dinilai kecil. "Sangat bisa diasumsikan begitu (tambahan pendapatan)," ujarnya.

Dia menilai akuntabilitas kunker ataupun bimtek DPRD masih buruk. Sistem akuntabilitas secara vertikal ataupun horizontal belum dibangun secara baik. Misalnya saja, meski sudah ada aturan terkait bagaimana pertanggungjawaban secara vertikal tapi belum juga dilaksanakan dengan baik. Sedangkan akuntabilitas horizontal berkaitan dengan asas manfaat dari bimtek dan kunker. Apakah dapat memaksimalkan kinerja DPRD sehingga bermanfaat bagi rakyat atau tidak. Bahkan dia menyebut kebobrokan di DPR tidak jauh berbeda dengan DPRD.

"Misalnya, untuk bimtek kenapa harus ke luar kota? Kenapa tidak di wilayahnya? Kunker ke luar negeri, padahal ada bagian kerja sama antar-negara di pemerintah pusat. Kan tinggal koordinasi. Itulah titik kritis DPRD dalam memaksimalkan kinerjanya," urainya.

**\*kiswondari/dita angga**